

**FEMINIMISME DALAM KONSTELASI POLITIK LOKAL DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO PERIODE TAHUN  
2019-2024**

**Siti Maryam<sup>1</sup>, Miranti<sup>2</sup>, Joko Setyoko<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muara Bungo

Email Korespondensi: sitimaryamumb201@gmail.com

**ABSTRACT**

*In today's modern politics, the presence of women in the world of politics is urgent. Democracy also mandates equal access and participation of women and men on the basis of equality, in all areas and levels of public life, especially in decision-making positions. Currently, the issue of gender equality has become a prominent issue in development platforms, not only in Indonesia but also in the world. Looking back, in the past, women's position in politics was marginalized, women had a very small portion compared to men. This is because there is a patriarchal culture that is not friendly towards women. The constructive socio-cultural understanding that was adopted at that time placed women as if they were only allowed to take care of domestic matters. In Bungo Regency, the results of the 2019 legislative election produced 5 DPRD members who were women. It is hoped that their existence will be able to fight for women's needs. This research was conducted on the performance of Council members in accommodating and conveying to the government the needs of women. women's rights, violence against women, reproductive health, gender equality, and promoting pro-women policies in the DPRD. The informants in this research are female members of the Council, and stakeholders. The results of this research show that the female DPRD members of Bungo Regency are trying in a limited number to take various steps to convey the aspirations of Bungo women. This can be seen from Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Maternal and Child Health. Then in the field there are discussion forums about femininity, for example counseling, mentoring women, etc. Apart from that, in Bungo itself, in the everyday world, such as the world of work, the world of education and the world of politics, there is no discrimination.*

**Keywords:** *Feminism, Legislative members, Pro-women policies*

**ABSTRAK**

*Dalam sebuah politik modern saat ini, kehadiran perempuan dalam dunia politik merupakan sebuah hal yang urgen. Demokrasi pun mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta perempuan dan laki-laki atas dasar persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama posisi pengambilan keputusan. Saat ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Menilik kebelakang, dahulu posisi perempuan dalam politik terpinggirkan, perempuan memiliki porsi yang sangat kecil di banding pria. Hal demikian dikarenakan adanya Budaya Patriarkis yang tidak ramah terhadap perempuan. Faham budaya konstruktif sosial-budaya yang di anut kala itu menempatkan Perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus persoalan domestik saja. Di Kabupaten Bungo hasil pemilu legislative 2019 menghasilkan 5 anggota DPRD yang berasal dari kaum wanita. Keberadaan mereka diharapkan akan mampu memperjuangkan kebutuhan wanita. Penelitian ini dilakukan pada kinerja anggota Dewan dalam menampung dan menyampaikan pada pemerintah kebutuhan wanita. hak-hak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan mempromosikan kebijakan pro-perempuan di DPRD Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah anggota Dewan yang berjenis kelamin perempuan, dan para stakeholder. Hasil penelitian ini*

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



*menunjukkan bahwa anggota DPRD perempuan Kabupaten Bungo berusaha dengan jumlah terbatas melakukan berbagai langkah untuk membawa aspirasi kaum wanita Bungo. Hal ini terlihat dari Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kesehatan Ibu dan Anak. Kemudian di lapangan ada forum-forum diskusi tentang kewanitaan, misal penyuluhan, pendampingan pada wanita dll. Selain itu di Bungo sendiri dalam dunia keseharian, seperti dunia kerja, dunia Pendidikan, dan dunia politik tidak ada diskriminasi.*

**Kata kunci:** *Feminisme, Anggota legislatif, Kebijakan pro perempuan*

## PENDAHULUAN

Persoalan perwakilan dalam politik menjadi penting Manakala telah adanya sebuah kesadaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak adanya keterwakilan Perempuan yang terlibat langsung secara proporsional dalam politik Hasil survei Bank Dunia menyatakan saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan serta kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan. Sejatinya, feminisme adalah sebuah mobilisasi sosial dalam konteks bernegara mengandung nilai-nilai kekuasaan untuk persamaan hak bagi perempuan. Dalam konteks politik lokal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), feminisme dapat diartikan sebagai upaya untuk memperjuangkan keterwakilan dan hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Dalam konteks ini, feminisme dapat diimplementasikan melalui beberapa upaya lain meliputi:

1. Mendorong keterwakilan perempuan dalam DPRD. Feminisme dapat diwujudkan dengan memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam DPRD. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan calon perempuan pada saat pemilihan legislatif. Selain itu, partai politik juga dapat memberikan jatah kursi yang cukup untuk perempuan dalam daftar calon legislatifnya.
2. Memperjuangkan isu-isu perempuan Feminisme juga dapat wujudkan dengan memperjuangkan isu-isu perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD. Isu-isu tersebut antara lain hak-hak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan lain sebagainya
3. Mempromosikan kebijakan pro-perempuan Feminisme juga dapat diwujudkan dengan mempromosikan kebijakan pro-perempuan di DPRD. Kebijakan tersebut dapat berupa program-program yang mendukung kesetaraan gender, perlindungan hak-hak perempuan, dan lain sebagainya.

Dalam keseluruhan upaya tersebut, penting untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, feminisme dapat menjadi sebuah gerakan kuat dan efektif memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan di DPRD. Penelitian ini difokuskan untuk melihat perempuan-perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten bungo periode 2019-2024, apakah mereka *concern* dalam artikulasi, agregasi dan advokasi kepentingan terkait isu-isu perempuan antara lain hak-hak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan mempromosikan kebijakan pro-perempuan di DPRD. Karena di kabupaten bungo sejak tahun 2019 hingga maret 2023 hanya ada satu peraturan daerah kabupaten bungo yang mencerminkan perlindungan hak-hak perempuan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kesehatan Ibu dan Anak. Artikulasi, agregasi dan advokasi yang dilakukan oleh anggota DPRD

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 2 Desember 2023

perempuan inilah yang dimaksudkan sebagai Feminimisme Dalam Konstelasi Politik Lokal Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Periode Tahun 2019-2024.

## METODE

Penelitian ini, menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif yaitu penelitian kualitatif dimana peneliti menyelidiki secara rinci program, peristiwa, proses dan kegiatan pada satu orang atau lebih. Lokasi penelitian adalah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. Dengan informan anggota DPRD sendiri, serta pihak stakeholder yang berkaitan dengan permasalahan ini. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk analisis sosial atas kejadian, fenomena, atau situasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif. Melalui pendekatan ini, didapat gambaran mengenai kondisi, faktor eksternal internal konstelasi politik perempuan di DPRD bungo periode 2019-2024 dengan didukung data-data tertulis yang didapat melalui observasi, dan wawancara.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan berusaha menampilkan wajah baru untuk mencapai tujuan politiknya. Strategi Kolektif adalah kekuatan yang dibangun oleh perempuan untuk bergerak berdasarkan isu kesetaraan yang serupa. Namun, kebijakan tersebut tidak serta merta menghilangkan rantai sosial karena struktur patriarki dan keagamaan, dimana perempuan masih mengalami ruang politik yang terbatas (tidak bebas) Tingkat keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia tidak terlepas dari ragam faktor, salah satunya adalah modal yang dimilikinya. Meski perolehan kursi perempuan tampak terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak signifikan karena modal caleg perempuan dikendalikan oleh politik patriarki melalui medan Pemilu. Dengan menggunakan teori Bourdieu tentang modal politik, sosial, ekonomi dan simbolik, diyakini sangat penting bagi perempuan untuk terjun dalam politik, tetapi pada kenyataannya modal itu ditentukan oleh habitus politik patriarki dalam kesadaran caleg perempuan dalam mengarungi medan persaingan politik Pemilu yang umumnya didominasi oleh struktur kelas laki-laki. Karena itu, meski sistem politik dalam Pemilu menyediakan afirmasi bagi caleg perempuan, dalam praktiknya, dominasi habitus politik patriarki yang dikendalikan oleh struktur kelas dalam masyarakat tidak memungkinkan caleg perempuan untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibanding laki-laki.

Saat ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Menilik kebelakang, dahulu posisi perempuan dalam politik terpinggirkan, perempuan memiliki porsi yang sangat kecil di banding pria. Hal demikian dikarenakan adanya Budaya Patriarkis yang tidak ramah terhadap perempuan. Faham budaya konstruktif sosial-budaya yang di anut kala itu menempatkan Perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus persoalan domestik saja.

Persoalan perwakilan dalam politik menjadi penting Manakala telah adanya sebuah kesadaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak adanya keterwakilan Perempuan yang terlibat langsung secara proporsional dalam politik. Hal tersebut cukup miris, mengapa? Karena dilihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang. Sementara bentuk keterwakilan perempuan di legislative masih sangat minim. Sehingga merangkum hal tersebut sangat perlu adanya sebuah revolusi paradigma perempuan dalam politik serta kesetaraan gender.

Dalam UU tentang Partai Politik dinyatakan bahwa setiap partai politik wajib mengikutsertakan perempuan di dalam politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dilembaga legislatif. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Bungo partai politik hanya berhasil menempatkan anggota legislatif perempuan sebanyak 2 orang, tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 6 orang dan di tahun 2019 sebanyak 5 orang anggota legislatif perempuan.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



Walaupun jumlah DPT perempuan tahun 2019 cukup banyak yaitu berjumlah 119.264 dan DPT laki-laki berjumlah 120.508 akan tetapi calon legislatif perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Bungo hanya sedikit yaitu 5 orang dari total anggota DPRD keseluruhan yang berjumlah 35 orang. Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Bungo pada tahun 2004: 1 caleg perempuan terpilih, tahun 2009: 2 caleg perempuan terpilih, tahun 2014 sebanyak 6 caleg perempuan terpilih, tahun 2019 : 5 caleg perempuan terpilih. Nama-nama anggota DPRD Kabupaten Bungo yaitu Jumari Ari Wardoyo, Desmiati, S.P, Rosmala Dewi, Leni Elvira, Mart Frida Yani.

Hadirnya 5 wanita dalam parlemen Bungo ,belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan dalam hal perjuangan terhadap pembelaan kaum wanita. Bahkan Ketua DPRD sendiri periode saat ini dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Jumari Ari Wardoyo, beliau berasal dari partai Gerindra. Terpilihnya Jumari Wardoyo sebagai ketua DPRD sebenarnya menunjukkan terbukanya pemahaman akan konsep kesetaraan di anggota DPRD Bungo dan khususnya pengurus partai Gerindra Bungo. Bahkan selama 2 periode Ketua DPRD Kabupaten Bungo dipimpin oleh kaum perempuan mulai dari Pemilu tahun 2014 sampai dengan Pemilu tahun 2019. Sebenarnya hal ini bisa menjadi modal bagi gerakan feminisme Bungo untuk memperjuangkan hak-hak perempuan lebih luas lagi. Akan tetapi realitas yang terjadi dilapangan, hasilnya belum maksimal . Hal ini terlihat dari hanya 1 (satu) Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Perempuan yang dihasilkan periode 2019-2024.

Keminiman demikian memicu sentiment gender di bidang politik, khususnya keparpolan karena teramat sedikit memiliki sumber daya manusia (SDM) perempuan. Padahal dengan keikutsertaan perempuan dalam politik relatif lebih gampang mengangkat suatu isu tentang perempuan ke permukaan. Rendahnya partisipasi politik perempuan di dunia politik dikarenakan rendahnya pendidikan politik perempuan tentang pemahaman pentingnya perempuan untuk terjun ke dunia politik agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berbasis gender seperti: 1. mempromosikan kebijakan pro perempuan, 2. kesetaraan gender, 3. kesehatan produksi, 4. hak-hak perempuan, 5. kekerasan terhadap perempuan

## 1. Artikulasi, Agregasi dan Advokasi dalam Mempromosikan Kebijakan Yang Pro Perempuan

Dalam sebuah sistem politik dikenal sebuah proses yang dikenal dengan Artikulasi dan agregasi kepentingan. Ini dipahami sebuah proses penyampaian aspirasi dari masyarakat pada Lembaga yang ada, yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya sebuah kebijakan. Di Kabupaten Bungo sendiri telah terbangun sebuah sistem dimana tersedia kegiatan-kegiatan khusus perempuan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya memberi ruang bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya serta bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perempuan. Misalkan perempuan yang ada di Kabupaten Bungo tergabung dalam sebuah wadah organisasi seperti Gabungan Organisasi Wanita (GOW), organisasi perempuan dilintas partai politik yaitu Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) . Ini sebagai upaya dari pemerintah memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut serta aktif dalam berorganisasi.

## 2. Artikulasi, Agregasi dan Advokasi dalam kesetaraan Gender

Saat ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Menilik kebelakang, dahulu posisi perempuan dalam politik terpinggirkan, perempuan memiliki porsi yang sangat kecil di banding pria. Hal demikian dikarenakan adanya Budaya Patriarkis yang tidak ramah terhadap perempuan. Faham budaya konstruktif sosial- budaya yang di anut kala itu menempatkan Perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus persoalan domestik saja.

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



Kesetaraan gender pada masyarakat Bungo tercipta melalui Pendidikan pada masyarakat. Bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga Pendidikan politik. Karena itu di Bungo terdapat institusi, baik milik pemerintah atau swasta memiliki pemimpin yang berasal dari kaum wanita. Hal ini menunjukkan ada ruang bagi wanita untuk tampil. Bahkan sudah 2 Periode, ketua DPRD Bungo dipimpin dari kaum wanita. Pada periode 2014-2019 diketuai Mayang Sari, S.H dan dilanjutkan pada Periode 2019-2024, Jumari Ari Wardoyo dipilih sebagai ketua DPRD Bungo. Bukan hanya dalam politik, dalam keseharian pun, misalkan dalam dunia pekerjaan, tidak ada pembeda dalam hal upah antara laki-laki dan perempuan. Upah hanya dibedakan berdasarkan jenis pekerjaannya dan menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Bungo.

### 3. Artikulasi, Agregasi dan Advokasi dalam Kesehatan Reproduksi

Wanita memiliki kodrat tersendiri yang berbeda dengan pria. Dimana wanita secara alamiah memiliki kodrat untuk mengandung dan melahirkan. Karena kodrat inilah, maka perlu perlakuan khusus terkait hal tersebut. Dalam reproduksi, wanita perlu mendapatkan perhatian kesehatan. Karena ini terkait dengan generasi penerus. Karena itu Pemerintah Daerah Bungo melalui Dinas Kesehatan memiliki kebijakan pendampingan pada ibu hamil dan bayi. Ini sebagai upaya untuk menekan angka stunting. Dengan di terbitkannya Perda Bungo No.1 Tahun 2021 Tentang Kesehatan Ibu dan Anak. Diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap ibu dan anak yang di prioritaskan oleh Pemda Kabupaten Bungo. Selain itu DPRD juga mendorong penyuluhan pada perempuan untuk kesehatan reproduksi remaja dan reproduksi pada usia lanjut

### 4. Artikulasi, Agregasi dan Advokasi dalam hak-hak Perempuan

Dalam kajian HAM, wanita memiliki hak seperti laki-laki. Hak tersebut meliputi hak dalam keluarga(perkawinan), politik, ketenagakerjaan, Pendidikan, dan kesehatan. Kalau dalam kehidupan politik, Di bungo terbuka kesempatan bagi semua wanita untuk ikut kompetisi politik. Di kabupaten Bungo tidak ada perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak dan posisi di ruang public. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak menjadi penghambat bagi perempuan di Kabupaten Bungo untuk tampil di ruang public. Hal ini terlihat dari terpilihnya 5 wanita sebagai anggota dewan, dan ada juga perempuan atas nama Leni Maryani, S.Am.Kep terpilih sebagai Datin Rio atau kepala Desa Purwobakti. Begitu juga dalam dunia Birokrasi atas nama Nova Lia sebagai PLT Di Dinas Sosial dan ibu Redawati sebagai PLT di dinas Perkim. Ibu Suryana sebagai Kepala Badan Inspektorat Bungo. Bahkan dalam Dunia Pendidikan pun wanita mendapatkan ruang untuk tampil sebagai pemimpin. Ini bisa dilihat pada kampus UMMUBA (Universitas Muhammadiyah Muara Bungo) ibu Renda Lestari, M.ed sebagai pejabat Rektor.

### 5. Artikulasi, Agregasi dan Advokasi dalam kekerasan terhadap perempuan

KDRT, sebuah istilah yang sangat familiar di sekitar kita, hampir setiap hari berita tentang KDRT selalu muncul. KDRT atau domestic violence merupakan tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, baik terhadap wanita ataupun pria. Tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga. Tindakan ini dapat berupa ancaman, paksaan atau pembatasan kebebasan yang tidak sesuai dengan hukum, yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga.

KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lainnya, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lemah.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



## Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sulitnya Perempuan untuk Mengartikulasikan serta Mengagas Kebijakan yang Pro terhadap Perempuan

- 1) Diskriminasi historis dan tradisional yang dialami perempuan, khususnya di bidang kehidupan publik telah menempatkan perempuan pada posisi marginal
- 2) Perempuan dianggap sebagai penyebab perempuan menjadi lupa akan kodratnya
- 3) Perempuan dianggap sebagai bentuk upaya perempuan menyaingi laki-laki
- 4) Perempuan dianggap sebagai intervensi budaya asing yang akan merombak tatanan budaya harmonis antara perempuan dan laki-laki
- 5) Bicara soal gender hanyalah bicara soal perempuan sehingga laki-laki tidak perlu terlibat di dalamnya.

## KESIMPULAN

Diskursus tentang kaum perempuan dan kedudukannya dalam kehidupan sosial selalu menjadi topik menarik. Dalam struktur sosial yang berkembang di masyarakat perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas. Apalagi dalam masyarakat yang secara umum bersifat patrilineal (memuliakan kaum lelaki dalam semua aspek kehidupan), karena itu penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Pembicaraan kalangan feminis tidak lepas relasi keadilan gender antara laki-laki dan perempuan yang kaitannya dengan konstruksi sosial di masyarakat. Selain itu banyak organisasi maupun individu memahami feminisme dengan sudut pandang yang berbeda sehingga mengakibatkan munculnya banyak pandangan mengenai teori feminisme
2. Keterwakilan perempuan dalam konstelasi politik legislatif local sangat diperlukan kehadirannya guna mendorong partisipasi politik perempuan di daerah agar meningkat. Selain itu, representasi politik perempuan juga hadir menjadi satu elemen utama yang jika kita akan membicarakan mengenai kematangan demokrasi menjadi satu kajian yang sangat penting. Oleh karenanya politik perempuan dalam konstelasi politik lokal menjadi sangat *urgent* untuk ditelaah. Terlebih pada aspek strategi guna melihat bagaimana politik identitas bekerja dalam konstelasi politik perempuan di ranah lokal

## REFERENSI

- Abdul Karim. *Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif*. Sawwa. Volume 10 Nomor 1. Tahun 2014.
- Afrizky Fajar Purnawan Dan Mohammad Ikhwanuddin. *Feminisme Dalam Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya (Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Di Ruang Politik)*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 7, No. 1, 2018
- Alrdi Samsa. *Strategi Politik Identitas Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi tentang Kemenangan Ade Kartika di Daerah Pemilihan II Kabupaten Majalengka)*. Jurnal Aristo (*Social, Politic, Humaniora*) Vol. 09, No.1 (2020): January,
- Anis Izdiha. *Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No.2 , Agustus 2017.
- Chandra Talpade Mohanti. *Feminisme Tanpa Batas, Marjin Kiri, Jakarta 2014*
- Dessy Ramadhani, Dian Eka Rahmawati. *Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2020, Vol. 10, No. 1: 39-62.
- UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX

